



JIMBIS NUSANTARA

Jurnal Inovasi Dan Manajemen Bisnis Nusantara

<http://jurnal.edunovationresearch.org/>

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI JAKARTA TAHUN 2017 – 2022

Putri Faraz Oktavi Yanti¹⁾, Suhono²⁾, Femmy Effendy³⁾*

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

²Program Studi Sistem Informasi, STMIK ROSMA Karawang

Email: femmy@rosma.ac.id

Abstract

This study aims to determine and examine the effect of Land and Building Tax and Acquisition Duty of Right on Land and Building both partially and simultaneously on DKI Jakarta's Original Local Government Revenue in 2017 – 2022. The population of this study includes data recapitulation targets and PBB-P2 and BPHTB revenues in 2017 – 2022. The sample was determined by purposive sampling. The data analysis technique in this study is Associative Quantitative. Hypothesis testing using the t test and f test.

The results of this research show that (1) PBB-P2 (X1) has a negative and significant effect on PAD DKI Jakarta. This is indicated by a significance value (Sig.) $0.019 < 0.05$. (2) BPHTB (X2) has a significant positive effect on PAD DKI Jakarta. This is indicated by a significance value (Sig.) $0.011 < 0.05$. (3) PBB-P2 (X1) and BPHTB (X2) have a simultaneous effect on PAD DKI Jakarta. This is indicated by a significance value (Sig.) $0.032 < 0.05$.

Keywords: Land and Building Tax, Acquisition Duty of Right on Land and Building, and Original Local Government Revenue.

INTRODUCTION

Dalam rangka penataan untuk peningkatan pemerintahan daerah, pembangunan, dan perluasan pelayanan masyarakat, pendapatan daerah perlu diusahakan dengan melihat sumber pendanaan daerah nya. Suatu langkah atau kegiatan untuk merevitalisasi kehidupan nasional disebut pembangunan nasional. Perlu dilakukan pembenahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan pemberian kekuasaan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang nyata, jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memadai, berbagai kebijakan terkait keuangan daerah berupaya memperkuat kapasitasnya untuk mendanai pelaksanaannya sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Untuk mempercepat proses mencapai kemandirian, kabupaten dan kota segera menaikkan kapasitasnya dalam menangani keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah.

Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah antara lain penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga memberi adanya dugaan PBB dan BPHTB berpengaruh atas PAD. PBB dan BPHTB termasuk dalam pos pajak daerah yang dikelola di DKI Jakarta yang merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD. Sehingga pemerintah perlu untuk melakukan

optimalisasi. PBB yakni pajak yang diperoleh atas adanya tanah dan bangunan yang menguntungkan orang, badan, atau kedua-duanya, sedangkan BPHTB yakni pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, khususnya atas perbuatan hukum atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya pembelian hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Kebijakan – kebijakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dalam memberikan kebijakan pajak yang adil sebagaimana sila ke-5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berisi Membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dengan nilai dibawah 2M. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka sekitar 1,2 juta unit atau 85 persen rumah di Jakarta terbebas dari penganan PBB. Dasar dalam pembuatan kebijakan tersebut yaitu mempertimbangkan luas minimum lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi begitu juga dengan tanah.



Gambar 1. Data Rekapitulasi Penerimaan Target dan Realisasi PBB-P2

Adapun rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 yang berasal dari 5 Sub Bagian Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara menunjukkan data penerimaan yang fluktuatif dimana Target penerimaan PBB-P2 yang tertinggi ada di tahun 2022 senilai Rp.10.250.000.000.000 dan yang terendah berada di tahun 2017 senilai Rp.8.000.000.000.000 adapun yang menjadi dasar target penerimaan di suatu daerah yaitu bagaimana potensi pajak pada suatu daerah itu sendiri. Dan untuk Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada tahun 2017 – 2022 juga menunjukkan data yang fluktuatif dimana hanya pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 yang mencapai target dengan realisasi penerimaan data yang tertinggi tercatat pada tahun 2019 senilai Rp.9.654.310.420.963.



Gambar 2. Data Rekapitulasi Penerimaan Target dan Realisasi BPHTB

Adapun gambar diatas menunjukkan nilai target dan realisasi penerimaan pajak BPHTB DKI Jakarta yang fluktuatif dimana realisasi penerimaan hanya terlampaui di Gambar 1. 2 Data Rekapitulasi Penerimaan Target dan Realisasi BPHTB tahun 2017 dengan nilai Rp.6.768.138.139.169 sedangkan ditahun setelahnya sampai tahun 2022 realisasi penerimaan pajak BPTHB selalu tidak mencapai target yang ada.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Pamungkas (2018), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) X1 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) X2 berpengaruh simultan terhadap PAD kota Yogyakarta. Secara parsial Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak berpengaruh terhadap PAD Yogyakarta tetapi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif terhadap PAD Yogyakarta. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Nurafifah dan Irawan (2020), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan dan positif baik secara parsial maupun simultan terhadap PAD di kota Bandung. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Arifiana, et al. (2020), mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Malang dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Malang.

Berdasarkan data, teori, dan penelitian terdahulu di atas penulis ingin meneliti “ Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2022 ” untuk melihat adakah pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

LITERATURE REVIEW

1. Akuntansi

Menurut American Accounting Association (AAA), Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukan penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

adalah menghitung atau mempertanggung jawabkan. Akuntansi digunakan hampir seluruh kegiatan bisnis diseluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis (Susilowati, 2016:1).

Menurut Syafri (2013:59) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternative pilihan. Menurut Miharja & Jaelani (2019) menjelaskan bahwa Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak pihak tertentu.

2. Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut N.J Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum Menurut Waluyo, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang dihasilkan secara lokal melalui sumber-sumber seperti pengelolaan aset, pajak, dan retribusi. Peningkatan efisiensi pemungutan, peningkatan dan perluasan jenis pungutan, pajak daerah, dan sumber pendapatan lainnya adalah semua cara untuk menyediakan pembiayaan dari pendapatan asli daerah. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi sumber pendanaan dan tolak ukur.

“Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dengan segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya yang dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.”

4. Pajak Daerah

“Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siahaan dalam Sabil (2017) memberikan definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kompensasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut PBB) adalah pajak yang dibebankan terhadap penguasaan dan/atau kepemilikan tanah dan/atau bangunan sebagai bentuk redistribusi atas manfaat yang telah diterima dari penguasaan atau kepemilikan tersebut sebagai upaya menciptakan keadilan sosial (Swasito & Safitra, 2020).

Istilah "Bumi" mengacu pada permukaan dunia, yang mencakup lautan samudra dan perairan pedalaman. Struktur teknik yang dikenal sebagai bangunan didirikan di atas atau secara permanen ditempelkan ke tanah, saluran air pedalaman, atau laut. "Pengertian menurut Mardiasmo yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia."

"Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. dan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat."

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Ada beberapa pengertian Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Mardiasmo (2018), diantaranya yakni :

- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya adalah pajak.
- b. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- c. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

BPHTB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada mereka yang membeli hak atas bangunan dan tanah. Negara memberikan penghargaan kepada mereka yang membayar BPHTB dengan memberikan mereka hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang telah mereka beli.

RESEARCH METHOD

1. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode Kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel. Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

a. Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2013) mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Data Rekapitulasi Penerimaan Target dan Realisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ada di DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Sampel adalah sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan yaitu Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling merupakan teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan memilih subyek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Kurun waktu data selama 6 tahun dari tahun 2017- 2022 lengkap, 2) Data realisasi PBB dan BPHTB dalam bentuk rupiah, 3) Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sampel pada penelitian ini adalah Data Rekapitulasi Penerimaan Target dan Realisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2017 – 2022. Jumlah data yang digunakan untuk penelitian ini, berjumlah 30 data dari total 5 kotamadya yang berada di dalam wilayah DKI Jakarta dalam 6 tahun (2017-2022).

b. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) teknik pengumpulan data sangat penting dalam mendapatkan data yang tepat dan akurat jika tidak digunakannya teknik pengumpulan data akan tidak dapat menentukan standar. Peneliti menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan data ini. Metode kepustakaan ini menggunakan buku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari Data Rekapitulasi Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada website <https://ppid.jakarta.go.id/> pada tahun 2017 – 2022.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan. Metode analisis data bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang 50 akurat dengan ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Korelasi.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Analisis Koefisien Determinasi

Uji determinan digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,) terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 55 dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi varaiabel dependen.

4. Pengujian Hipotesis

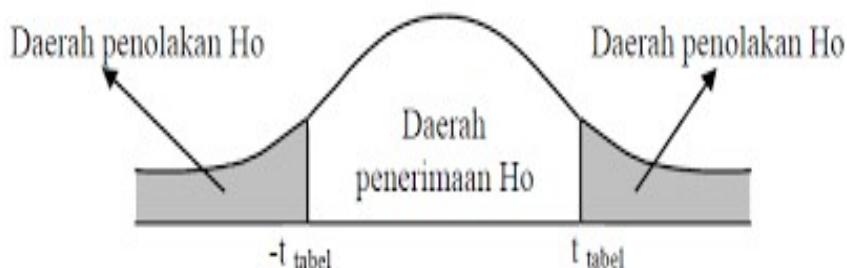
a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2018: 57). Uji t dilakukan pada hipotesis untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh secara individu terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pengujian menggunakan nilai signifikan (α) 0.05 atau tingkat keyakinan 95%. Hipotesisi dari uji t adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 = 0$ Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta
- 2) $H_1 : \beta_1 \neq 0$ Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta
- 3) $H_0 : \beta_2 = 0$ Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta
- 4) $H_2 : \beta_2 \neq 0$ Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

Indikator dalam pengambilan keputusan sebagai berikut, berdasarkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta :

- 1) Jika nilai signifikan uji $t > \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
- 2) Jika nilai signifikan uji $t < \alpha$ (0.05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.



Gambar 3. Kurva Distribusi Uji t

b. Uji Simultan (Uji f)

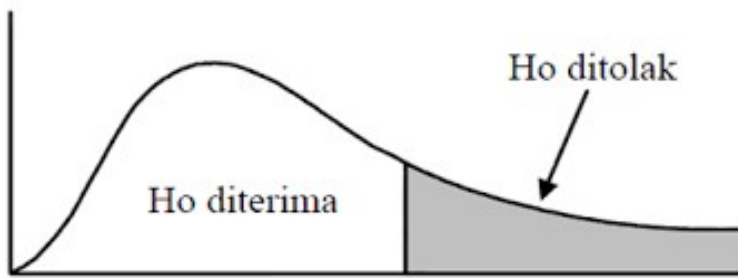
Menurut Ghozali (2018: 56) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama– sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini Uji statistik f tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% (0.05) yang berarti resiko kesalahan pengambilan keputusan adalah 0.05. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh yaitu Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta secara bersama sama terdapat hipotesis dari uji f sebagai berikut :

- 1) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) $H_3 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi uji $f < 0.05$ maka H_0 ditolak.
- 2) Jika nilai signifikansi uji $f > 0.05$ maka H_0 diterima.



Gambar 4. Kurva Distribusi Uji f

DATA AND ANALYSIS

1. Pencapaian Penerimaan PBB-P2

Pencapaian Penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta di setiap tahunnya mengalami penerimaan yang fluktuatif dengan rata rata presentase pencapaian sebesar 94,72%. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1. yaitu sebagai berikut;

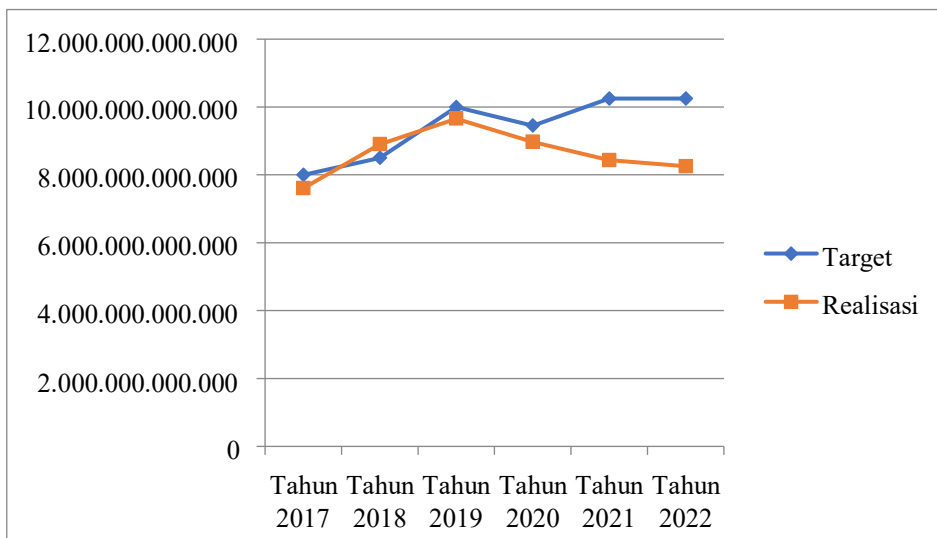
Tabel 1. Penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022

NO	TAHUN	PBB-P2		PRESENTASE PENCAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2017	8.000.000.000.000	7.607.315.017.008	95,09
2	2018	8.500000.000.000	8.903.330.671.892	104,75
3	2019	10.000.000.000.000	9.654.310.420.963	96,54
4	2020	9.450.000.000.000	8.972.478.977.120	94,95
5	2021	10.250.000.000.000	8.432.360.393.070	82,27
6	2022	10.250.000.000.000	8.253.701.449.031	80,52

Sumber: Data PBB-P2 Bapenda 2023, Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1. Penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022 penerimaan realisasi PBB-P2 di setiap tahunnya selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hanya pada tahun 2018 penerimaan realisasi PBB-P2 mencapai target yang ditentukan sebesar Rp. 8.500.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.903.330.671.892 dengan presentase pencapaian 104,75% .

Untuk melihat lebih jauh perkembangan target dan realisasi PBB-P2 di DKI Jakarta pada Tahun 2017 s/d 2022 dapat dilihat pada Grafik 1. dibawah ini sebagai berikut:



Grafik 1. Target dan Realisasi PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022

2. Pencapaian Penerimaan BPHTB

Pencapaian Penerimaan BPHTB di DKI Jakarta di setiap tahunnya mengalami penerimaan yang fluktuatif dengan rata rata presentase pencapaian sebesar 86,27%. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2. yaitu sebagai berikut;

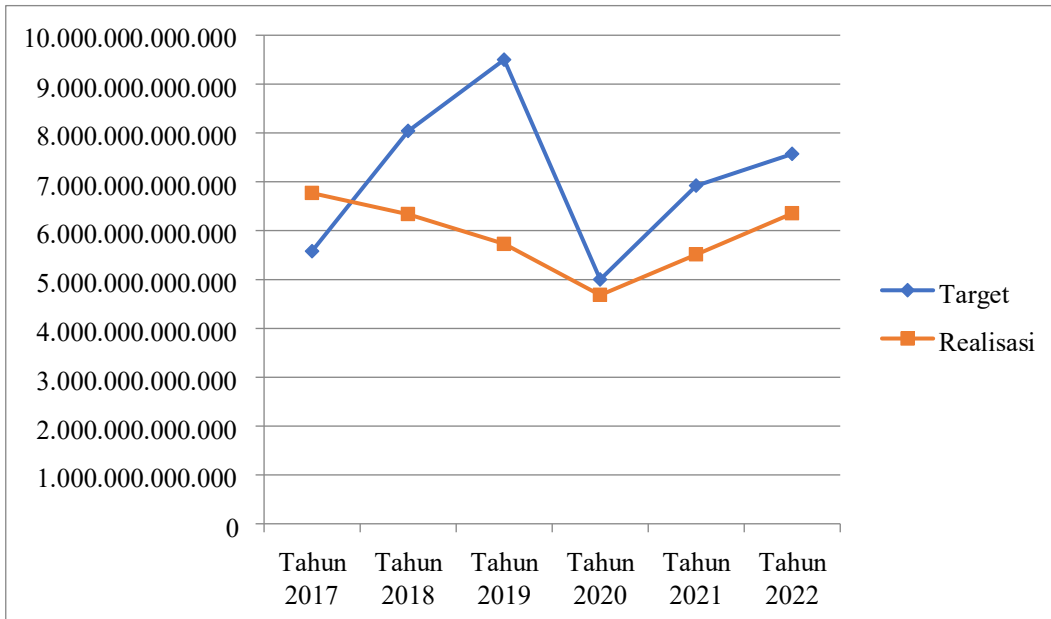
Tabel 2. Penerimaan BPHTB DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022

NO	TAHUN	BPHTB		PRESENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	2017	5.579.500.000.000	6.768.138.139.169	121,30
2	2018	8.039.599.000.000	6.335.596.442.107	78,80
3	2019	9.500.000.000.000	5.728.131.187.296	60,30
4	2020	5.000.000.000.000	4.681.442.315.680	93,63
5	2021	6.920.000.000.000	5.511.563.659.515	79,65
6	2022	7.570.000.000.000	6.353.866.059.761	83,93

Sumber: Data BPHTB Bapenda 2023, Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2. Penerimaan BPHTB DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022 penerimaan realisasi BPHTB di setiap tahunnya selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hanya pada 0 2.000.000.000.000 4.000.000.000.000 6.000.000.000.000 8.000.000.000.000 10.000.000.000.000 12.000.000.000.000 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Target Realisasi Grafik 4. 1 Target dan Realisasi PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022 tahun 2017 penerimaan realisasi BPHTB mencapai target yang ditentukan sebesar Rp. 5.579.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.768.138.139.169 dengan presentase pencapaian 121,30%.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan target dan realisasi BPHTB di DKI Jakarta pada Tahun 2017 s/d 2022 dapat dilihat pada Grafik 2. dibawah ini sebagai berikut;



Grafik 2. Target dan Realisasi BPHTB DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022

3. Pencapaian Penerimaan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada tahun 2017 s/d tahun 2022 menunjukkan data penerimaan realisasi yang didominasi oleh penurunan dimana hanya pada tahun 2017 dan 2021 yang mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3. yaitu sebagai berikut;

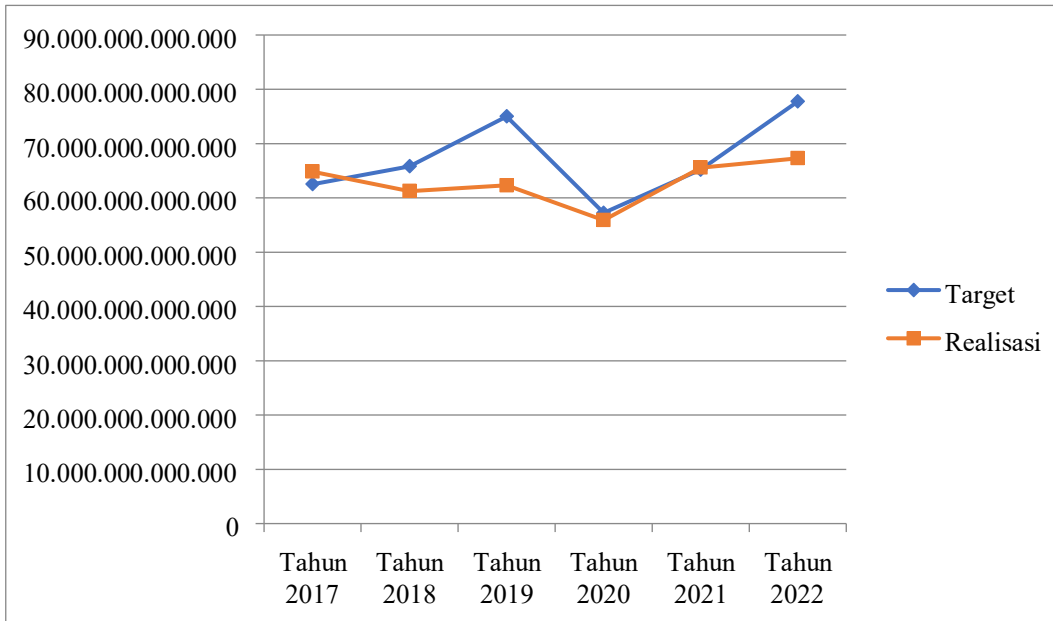
Tabel 3. Penerimaan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022

NO	TAHUN	PAD DKI JAKARTA		PRESENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	2017	62.517.744.026.535	64.823.887.369.820	103,69
2	2018	65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05
3	2019	74.997.497.375.481	62.300.679.833.068	83,07
4	2020	57.234.618.765.469	55.887.004.237.727	97,65
5	2021	65.209.105.040.795	65.567.009.199.000	100,55
6	2022	77.746.030.000.000	67.287.720.000.000	86,55

Sumber: Data PAD DKI JAKARTA, Diolah peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 3. Penerimaan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2017 s/d 2022 Penerimaan realisasi di setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hanya pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp. 64.823.887.369.820 pada target Rp. 62.517.744.026.535 dan tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 65.567.009.199.000 pada target Rp. 65.209.105.040.795 penerimaan realisasi PAD DKI Jakarta melampaui target yang di tentukan dengan rata rata presentase pencapaian sebesar 102,12%.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan target dan realisasi Penerimaan Asli Daerah DKI Jakarta pada Tahun 2017 s/d 2022 dapat dilihat pada Grafik 3. dibawah ini sebagai berikut;



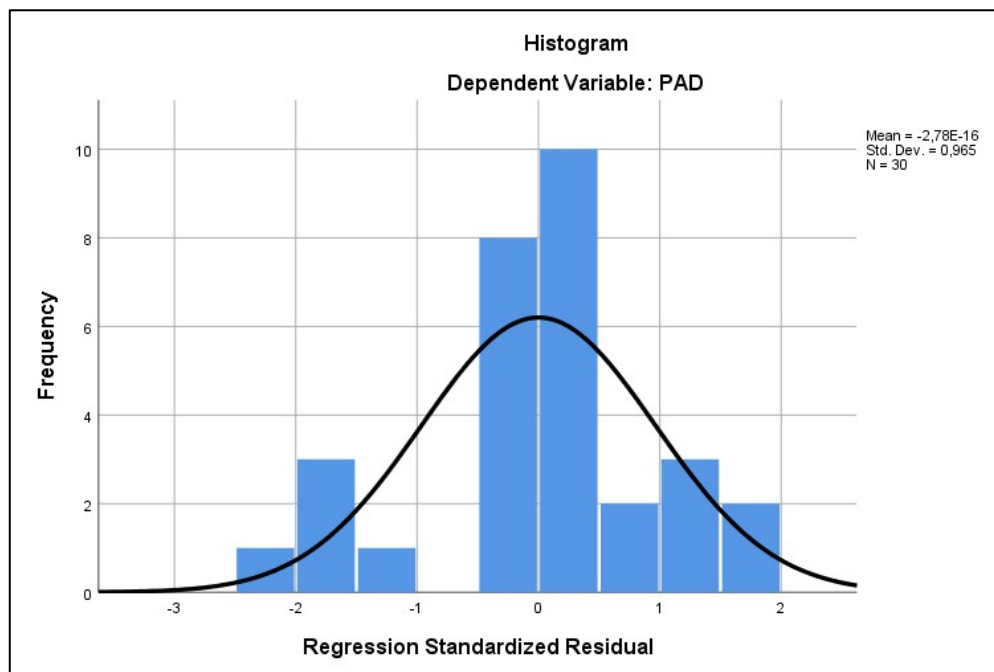
Grafik 3. Target dan Realisasi PAD DKI Jakarta Tahun 2017 s/d 2022

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal serta bebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedasitas.

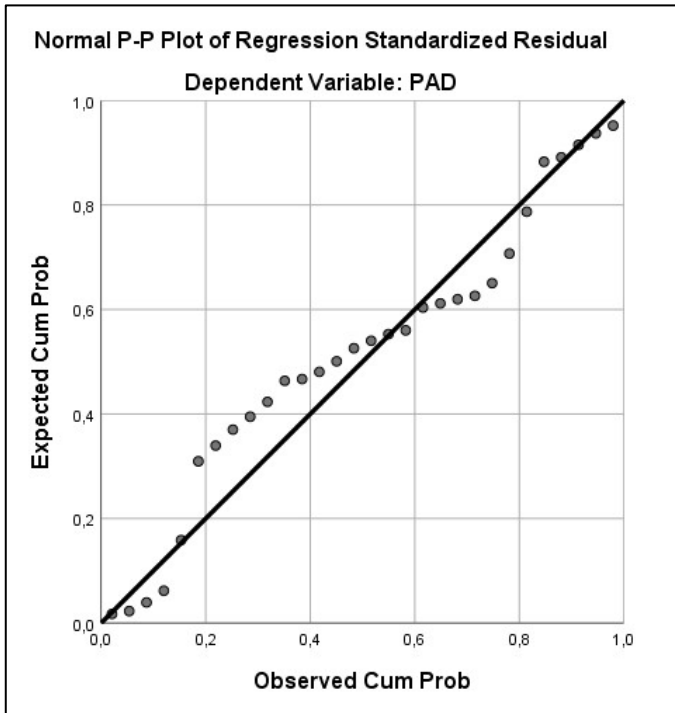
1) Pendekatan Histogram



Gambar 5. Histogram Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada gambar 5. diatas memperlihatkan bahwa pada grafik histogram diatas distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak miring kiri maupun kanan atau dapat disimpulkan bahwa data diatas berdistribusi normal.

2) Pendekatan Normal Probability



Gambar 6. Normal Probabilty Plot

Hasil uji normalitas pada gambar 6. diatas memperlihatkan bahwa terlihat titik-titik penyebaran disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi normal.

3) Pendekatan Kolmogorov smirnov

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0010417
	Std. Deviation	3,31655E+12
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,111
	Negative	-,136
Test Statistic		,136
Asymp. Sig. (2-tailed)		,161 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v26, 2023.

Interpretasi pada uji normalitas yaitu jika data terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansinya > 0,05 sebaliknya apabila signifikansinya < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Bersumber pada penelitian peneliti atas Gambar 6. di atas dengan uji normalitas menggunakan KolmogorovSmirnov Test diperoleh nilai asymp. sig sebesar 0,161 dimana data lebih besar dari pada interpretasi uji normalitas yang nilai signifikansinya > 0,05 maka data berdistribusi normal dan mampu menyimpulkan Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov

Smirnov kesimpulan data pada sampel yang digunakan peneliti pada penelitian memadai untuk digunakan.

b. Uji Multikolenaritas

Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gangguan multikoloniaritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Apabila nilai VIF menunjukkan angka kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi terbebas dari gangguan multikolinieritas, dan apabila nilai VIF menunjukan angka lebih dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1 maka model regresi mengalami gangguan multikolinieritas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,359E+13	1,744E+12		36,455	,000		
	PBB	-3,646	1,466	-,657	-2,488	,019	,412	2,428
	BPHTB	4,944	1,807	,722	2,737	,011	,412	2,428

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v2 6, 2023.

Berdasarkan Tabel 5. Uji Multikolinieritas diatas peneliti mengetahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance 0.412 > 0.10 dan VIF 2.428 < 10.00 , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji hipotesis yang disebut uji Glejser menggunakan regresi residual absolut untuk menentukan apakah model regresi menunjukkan tandatanda heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,800E+12	1,121E+12		2,498	,019
	PBB	1,222	,942	,364	1,298	,205
	BPHTB	-2,258	1,161	-,546	-1,945	,062

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v26, 2023.

Bersumber dari uji heteroskedastisitas pada tabel coefficients tabel 6. diatas yang peneliti lakukan Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer dapat terlihat bahwa nilai signifikansi variabel PBB sebesar 0,205 dimana nilai tsb > 0,05 dan nilai signifikansi variabel BPHTB sebesar 0,062 > 0,05 yang memberi kesimpulan bahwa data penelitian tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini menggunakan uji autokorelasi Durbin Watson dengan syarat tidak terjadinya autokorelasi adalah $DU < DW < 4 - DU$.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,418 ^a	,175	,112	2,11190E+12	1,642

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1
 b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v26, 2023.

Berdasarkan Gambar 7. pengujian auto korelasi didapati nilai Durbin Watson adalah sama dengan 1,642. Tabel 7. Uji Autokorelasi Menggunakan tingkat signifikan 5% nilai DU adalah 1,567 selanjutnya hasil dari (4 – DU = 4 – 1,642 = 2,433). Syarat tidak terjadinya autokorelasi adalah $DU < DW < 4 - DU$ maka dari itu dengan nilai $1,567 < 1,642 < 2,433$ maka dapat disimpulkan yakni tidak terjadi gejala autokorelasi.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,359E+13	1,744E+12		36,455	,000
	PBB	-3,646	1,466	-,657	-2,488	,019
	BPHTB	4,944	1,807	,722	2,737	,011

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v26, 2023.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut bersama dengan interpretasinya:

$$Y = 63.590.000.000.000 - 3,646 X1 + 4,944 X2$$

- a. Nilai konstanta persamaan regresi sebesar 63.590.000.000.000 menyatakan bahwa jika tidak ada PBB dan BPHTB maka PAD DKI Jakarta sebesar 63.590.000.000.000.
- b. Berdasarkan persamaan koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel PBB (X1) mempunyai arah regresi negatif dengan PAD DKI Jakarta yaitu sebesar -3,646 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan PBB akan menurunkan PAD DKI Jakarta sebesar 3,646 satuan dengan anggapan bahwa X2 tetap.
- c. Berdasarkan persamaan koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel BPHTB (X2) mempunyai arah regresi positif dengan PAD DKI Jakarta yaitu sebesar 4,944 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan BPHTB akan meningkatkan PAD DKI Jakarta sebesar 4,944 satuan dengan anggapan bahwa X1 tetap.

6. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R Square) bertujuan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat dalam satuan persen pada sebuah model regresi penelitian. Hasil 80 uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,475 ^a	,225	,168	3,437E+12

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB
 b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v26, 2023.

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” diatas, diketahui nilai koefisien determinasi / R Square adalah 0,225 atau sama dengan 22,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel PBB (X1) dan BPHTB (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel PAD DKI Jakarta (Y) sebesar 22,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

7. Uji Parsial (Uji t)

Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria :

- a. Jika nilai signifikansi uji $t > \alpha$ (0.05), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
- b. Jika nilai signifikansi uji $t < \alpha$ (0.05), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Hasil dari Uji t yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6,359E+13	1,744E+12		36,455	,000	
	PBB	-3,646	1,466	-,657	-2,488	,019	,412
	BPHTB	4,944	1,807	,722	2,737	,011	,412

Model		Collinearity Statistics
		VIF
1	(Constant)	
	PBB	2,428
	BPHTB	2,428

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel hasil output SPSS “Coefficients” diatas, maka pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengujian PBB-P2 (X1) terhadap PAD DKI Jakarta (Y)
 H0 : $\beta_1 = 0$ Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

H1 : $\beta_1 \neq 0$ Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah dugaan adanya pengaruh PBB-P2 (X1) terhadap PAD DKI Jakarta (Y). Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel PBB-P2 adalah sebesar 0,019 Karena nilai Sig. 0,019 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya variabel PBB-P2 memiliki pengaruh secara parsial terhadap PAD DKI Jakarta (Y).

2) Pengujian BPHTB (X2) terhadap PAD DKI Jakarta (Y)

H0 : $\beta_2 = 0$ Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

H2 : $\beta_2 \neq 0$ Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dugaan adanya pengaruh BPHTB (X2) terhadap PAD DKI Jakarta (Y). Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” di atas diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel BPHTB adalah sebesar 0,011 Karena nilai Sig. 0,011 < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan Ho ditolak. Artinya variabel BPHTB memiliki pengaruh secara parsial terhadap PAD DKI Jakarta (Y).

8. Uji Simultan (Uji f)

Pada uji F penelitian ini akan memakai nilai signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria :

- a. Jika nilai signifikansi uji $f > \alpha$ (0.05), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menyatakan bahwa semua variabel independent yaitu PBB-P2 dan BPHTB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
- b. Jika nilai signifikansi uji $f < \alpha$ (0.05), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menyatakan bahwa semua variabel independen yaitu PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Hasil dari Uji f yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,283E+25	2	4,641E+25	3,929	,032 ^b
	Residual	3,190E+26	27	1,181E+25		
	Total	4,118E+26	29			

a. Dependent Variable: PAD
 b. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB

Sumber: Hasil Olah Data SPSS v26, 2023.

- 1) H0 : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya semua variabel independen PBB-P2 (X1) dan BPHTB (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PAD DKI Jakarta (Y)
- 2) H3 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, artinya semua variabel independen PBB-P2 (X1) dan BPHTB (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen PAD DKI Jakarta (Y)

Berdasarkan tabel output SPSS “Anova” diatas diketahui nilai Signifikansi (Sig) adalah 0,032 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 diterima yaitu dengan kesimpulan bahwa semua variabel independen PBB-P2 (X1) Tabel 11. Uji f dan BPHTB (X2) terhadap variabel dependen PAD DKi Jakarta (Y).

CONCLUSION, IMPLICATION/LIMITATION AND SUGGESTION

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Y).
- b. Variabel Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Y).
- c. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X1) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (X2) keduanya berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (Y).

2. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

- a. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dan data yang update terkait dengan pengaruh PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Apabila peneliti berikutnya tertarik melakukan kajian yang sama diharapkan peneliti berikutnya memodifikasi variabel variabel yang ada baik menambah variabel atau menambah time series sehingga akan memberikan data yang lebih bervariasi dalam melakukan penelitian.
- b. Bagi pemerintah daerah Kota DKI Jakarta, diharapkan penelitian ini dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran umum bagaimana kinerja Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya. Serta memberikan pengetahuan agar meningkatkan kesadaran akan membayar pajak daerah.

REFERENCES

Arifiana, D. R., Rifa'I, M. N., Hakim, A. L., & Ainulyaqin, M. H. (2020) *Pengaruh Bea*

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan

Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). Jurnal Ekonomi Syariah

Pelita Bangsa (149-160).

American Accounting Association (AAA). 1916. Amerika

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan*

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan <https://bprd.jakarta.go.id>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022). *UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal*
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpdre-design-desentralisasi-fiskal.html> .

N.J Feldman. (2012) *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli*

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Edisi Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2022). *Menakar Impact Diskon PBB-P2 DKI Jakarta Terhadap Sektor Properti*.
<https://www.kppod.org/berita/view?id=1132> .

Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta. Penerbit

Miharja, K. & Jaelani, M. A. (2019). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada LPK Aisyah Bogor Menggunakan Zahir Accounting*.

Nurafifah, T., & Irawan, A. (2020) *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung*.
Indonesian Accounting Research Journal (190-199). Politeknik Negeri Bandung.

Pamungkas, S. (2018). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. *Jurnal Ekobis Dewantara (46-56)*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Rochmat Soemitro . (2013). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli*

Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara pusat dan daerah*. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi*. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18*.

Susilowati, L. (2016). *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*. Yogyakarta. Penerbit Kalimedia .

Syafri, S. (2013). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Swasito, A. P., & Safitra, D. A. (2020). *PBB Sektor P5L*. Tangerang Selatan:

Politeknik Keuangan Negara STAN.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Appendix

Include other supplementary details here.